

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 22 Juli 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A BPK RI			
	1	Lawatan Mencurigakan Para Amtenar	<i>Koran Tempo/Hal.20</i>
	2	Puluhan Miliar Masuk ke Rekening Pribadi	<i>Tribun Jabar/Hal. 2</i>
B Kota Bandung			
	1	Pengerjaan Tahap II Skywalk Cihampelas Tertunda	<i>Pikiran Rakyat/Hal. 4</i>
C Kota Cimahi			
	1	Penerima JKN-KIS Bertambah 17.217 Orang	<i>Galamedia/Hal.4</i>

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Lawatan Mencurigakan Para Amtenar

Entitas / Cakupan : BPK RI

Sumber / Hal : Koran Tempo/Hal.20

Edisi : Rabu, 22 Juli 2020

## Lawatan Mencurigakan Para Amtenar

Penyimpangan senilai Rp 102,76 miliar ditemukan dalam perjalanan dinas tahun lalu.

**Ghoida Rahmah**

[ghoida.rahmah@tempo.co.id](mailto:ghoida.rahmah@tempo.co.id)

**JAKARTA** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/ lembaga sepanjang tahun lalu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, nilai penyimpangan tersebut mencapai Rp 102,76 miliar.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan tersebut baru didasarkan pada kewajaran informasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. BPK

belum melalui pemeriksaan mendalam. “Kami ungkap dulu di sini,” ujar Agung di Jakarta, kemarin.

Bila sekiranya BPK memandang perlu untuk meningkatkan efisiensi dan berdampak material terhadap kinerja kelembagaan, auditor negara tersebut akan melakukan audit kinerja untuk memberikan rekomendasi.

Sejumlah penyimpangan yang ditemukan itu antara lain belum adanya bukti pertanggungjawaban, harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya, perjalanan dinas rangkap, perjalanan dinas fiktif, hingga kelebihan pembayaran.

Berkaca dari temuan

tersebut, BPK mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja perjalanan dinas di kementerian/ lembaga, sehingga persoalan serupa tidak terulang. Apalagi tahun ini pemerintah menghadapi pandemi Covid-19, yang menyedot kebutuhan anggaran cukup besar.

Agung mengatakan realisasi belanja harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari *moral hazard* di kemudian hari. “Kalau ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan kelihatan saat kami audit, dan pasti akan kami ungkap,” ujarnya.

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Perwakilan Rakyat pekan lalu, anggota Dewan men- cecar pejabat Kementerian Desa ihwal temuan penyimpangan senilai Rp 8,1 miliar.

“Masalah uang perja- lanan dinas ini memalukan, terlalu besar terjadi penyimpangan,” kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hasan Basri Agus.

Hasan menyayangkan temuan penyimpangan yang masih terus berulang, meski telah ditindaklan- juti. “Apalagi penyele- wengan dana perjalanan dinas umumnya bermodus titipan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang merupakan model kecurangan lawas.”

Kritik serupa datang dari anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Eddy Santana. Dia mengatakan temuan terhadap dana perjalanan dinas sulit dikembali- kan. Pasalnya, nilai yang diterima oleh aparat sipil negara (ASN) umumnya bernominal di bawah Rp 10 juta.

Selain itu, adanya

temuan perjalanan fiktif menunjukkan struktur kelembagaan yang ada belum berjalan optimal. “Kementerian harus mengatur agar perjalanan dinas memperoleh izin lebih dulu dari eselon I dan II,” ujar Eddy.

Menteri Desa, Pempa- ngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menutur- kan temuan penyimpang- an biaya perjalanan dinas sebesar Rp 8,1 miliar telah ditindaklanjuti sebesar Rp 3,9 miliar. “Jadi, yang 48,91 persen sudah kami selesaikan,” katanya.

Abdul memastikan jajarannya telah menelu- suri persoalan utama yang melatarbelakangi temuan BPK. “Misalnya, perjalan- an dinas ada yang wak- tunya beririsan sehingga dihitung dua kali dan ter- jadi perekapan ganda.”

Ke depan, Abdul menga- takan, kementerianya tengah mencari solusi terbaik agar perjalanan dinas berjalan lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ● FRANSISCA CHRISTY ROSANA

Salah satu kementerian yang melakukan penyim- pangan perjalanan dinas adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam rapat Komisi V Dewan

## Penyimpangan Perjalanan Dinas

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai penyimpangan dalam realisasi perjalanan dinas pada 2019 di 43 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 102,76 miliar. Berikut ini detail temuan tersebut:

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Belum ada bukti pertanggungjawaban	Rp 20,25 miliar	10
Harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	Rp 9,5 miliar	5
Perjalanan dinas rangkap	Rp 196,44 juta	5
Perjalanan dinas fiktif	Rp 715,24 juta	3
Belanja perjalanan dinas belum sesuai dengan ketentuan/kelebihan pembayaran	Rp 15,93 miliar	30
Penyimpangan belanja perjalanan dinas lainnya	Rp 56,16 miliar	28



# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Puluhan Miliar Masuk ke Rekening Pribadi
Entitas / Cakupan	: BPK RI
Sumber / Hal	: Tribun Jabar/Hal. 2
Edisi	: Rabu, 22 Juli 2021

## Puluhan Miliar Masuk ke Rekening Pribadi

**JAKARTA, TRIBUN** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan lima kementerian dan lembaga menyimpan uang negara di rekening pribadi. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan hasil pemeriksaan dan temuan tersebut menunjukkan fakta penggunaan rekening pribadi di lima kementerian dan lembaga itu untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 71,78 miliar. Temuan kami adalah di Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten," ujar Agung dalam *teleconference*, di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Agung, dari jumlah tersebut paling banyak terdapat di Kementerian Pertahanan. "Masuk rekening pribadi di Kementerian Pertahanan itu bersumber dari APBN sebesar Rp 48,12 miliar. Berupa rekening bank, belum dilaporkan dan atau belum dapat izin Menteri Keuangan," katanya.

Agung mengatakan bila kementerian dan lembaga mau membuka reke-

ning untuk pengelolaan uang negara harus dilaporkan dan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. "Hasil pemeriksaan menunjukkan 62 rekening bank di lingkungan Kementerian Pertahanan belum dilaporkan dan atau belum mendapatkan izin Menteri Keuangan," ujarnya.

BPK, kata Agung, juga menemukan ada uang negara di rekening pegawai Bawaslu. Uang tersebut, kata dia, berasal dari pengembalian sisa belanja langsung dan tambahan uang persediaan (TUP) di Bawaslu kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

"Jumlahnya sebesar Rp 2,93 miliar. Tidak disetorkan ke rekening Bawaslu provinsi, tapi disetorkan ke rekening pribadi," katanya.

Agung mengatakan bukti setor belanja di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung terdapat penyetoran sisa belanja langsung dan TUP ke rekening atas nama FR. "FR ini staf pada Subag SDM Bawaslu Provinsi Lampung. Permintaan keterangan kepada saudara FR menyatakan bahwa rekeningnya dipinjam oleh bendahara untuk menampung sementara pengambilan dana sisa belanja dari Bawaslu kabupaten dan kota," kata Agung. (tribun network/van/wly)

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	:	Pengerjaan Tahap II Skywalk Cihampelas Tertunda
Entitas / Cakupan	:	Kota Bandung
Sumber / Hal	:	Pikiran Rakyat/Hal. 4
Edisi	:	Rabu, 22 Juli 2022

## Pengerjaan Tahap II Skywalk Cihampelas Tertunda

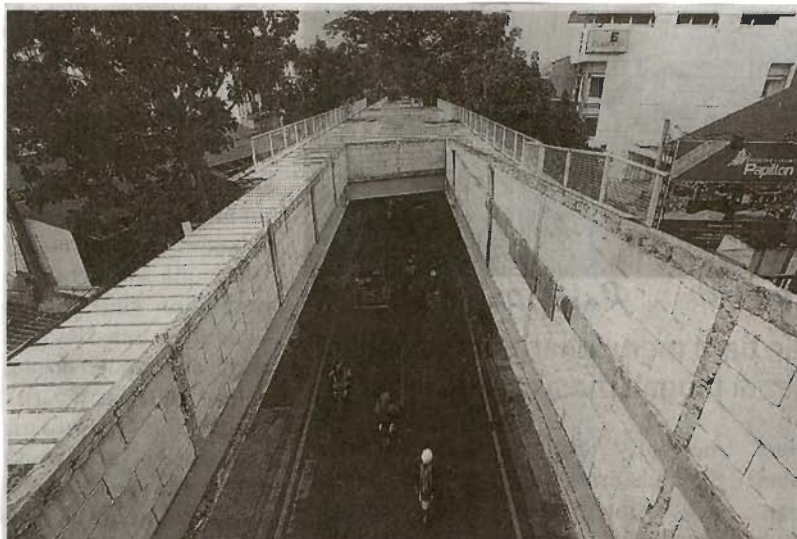
### **BANDUNG, (PR).-**

Pembangunan tahap II Skywalk Cihampelas sampai rampung berlanjut pada 2021. Pemerintah Kota Bandung sempat mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk merampungkan pengerjaan tahap II Skywalk pada 2020. Akan tetapi, alokasi anggaran untuk sisa pembangunan tahap II Skywalk Cihampelas termasuk bagian yang terkena realokasi penanganan pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandung Didi Ruswandi menyebutkan, progres pembangunan Skywalk Cihampelas saat terhenti mencapai 92 persen. "Sekitar 8 persen lagi mencakup penyelesaian konstruksi juga pemasangan aksesori seperti tempat duduk. Perbaikan aksesori yang sudah ada pun termasuk dalam sisa 8 persen itu," ucap Didi di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (21/7/2020).

Pihaknya, tutur Didi, bakal mengalokasikan anggaran untuk sisa pembangunan tahap II Skywalk Cihampelas pada 2020. Harapannya, pengalokasian anggaran itu terealisasi.

Perihal fungsi Skywalk Cihampelas bagi pengunjug, Didi mengakui, saat ini belum berjalan secara utuh.



ARMIN ABDUL JABBAR/PR

**SEJUMLAH** kendaraan melintas di bawah proyek pembangunan Skywalk Cihampelas tahap kedua di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (21/7/2020). Kelanjutan pembangunan Skywalk Cihampelas kembali tertunda tahun ini, karena Pemkot Bandung merealokasi untuk penanganan Covid-19.\*

Pihaknya tengah berupaya agar fasilitas Skywalk yang sudah ada dapat di-

tidak bisa merampungkan pengerjaan walaupun beroleh tambahan waktu

### **Drumpori**

Didi juga menyampaikan perih komitmen penambahan drumpori di lingkungan permukiman warga. Pihaknya sudah membuat 1.797 drumpori per 10 Juli 2020. Keberadaan drumpori dinilai cukup efektif menyerap air, terutama saat musim hujan. "Keberadaan drumpori mengurangi volume air ke drainase atau yang mengalir ke jalan," ucapnya.

Pihaknya, tutur Didi, berupaya keberadaan drumpori menjadi 3.500 unit pada akhir 2020. Guna menunjang upaya tersebut, pihaknya telah menggerakkan setiap unit pelaksanaan teknis. "Optimistis dapat tercapai mengingat kesadaran masyarakat akan fungsi drumpori makin baik, bahkan terus meningkat," tuturnya.

DPU Kota Bandung, kata Didi, juga merencanakan pembuatan sumur imbuhan sedang pada 2020. Daya serap sumur imbuhan tersebut lebih besar daripada drumpori. Pihaknya bakal menempatkan sumur imbuhan sedang di area Rusunawa Cingised.

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Penerima JKN-KIS Bertambah 17.217 Orang

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Galamedia/Hal.4

Edisi : Rabu,22 Juli 2023

## Penerima JKN-KIS Bertambah 17.217 Orang

### SIRNARASA, (GM).-

Jumlah penerima Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Cimahi bertambah 17.217 orang. Sehingga total peserta PBI yang dibiayai oleh APBD Kota Cimahi sebanyak 38.737 orang.

Jumlah itu sekaligus melengkapi PBI Kota Cimahi lainnya yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN sebanyak 116.523 orang. Adapun jumlah total kepesertaan JKN di Kota Cimahi saat ini mencapai 510.661 orang.

Penyaluran kepesertaan JKN-KIS bagi PBI Kota Cimahi diawali di Kelurahan Cibabat, dan Kelurahan Pasirkaliki, yang secara simbolis diserahkan Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna, Selasa (21/7).

Penerima JKN-KIS dari PBI Kota Cimahi sebanyak 1.151 kartu untuk wilayah Kelurahan Cibabat, dan 184 kartu untuk Kelurahan Pasirkaliki.

"Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kota Cimahi melalui JKN, dengan harapan Kota Cimahi dapat mencapai cita-cita besar yaitu seluruh warga Kota Cimahi ter-cover JKN," ungkap Ajay di sela-sela kegiatan "Sosialisasi JKN dan Penyerahan Simbolis KIS" di kantor Kelurahan Cibabat Jln. Sirnarasa, Selasa (21/7).

Ia mengatakan, pembagian JKN-KIS untuk PBI Kota Cimahi tahun ini mencapai 17.217 orang. "Penerimaannya untuk tahun ini sekitar 17.217 orang. Mudah-mudahan kartu ini tidak terpakai, dan masyarakat semua sehat," ujarnya

Menurut Ajay, penerima PBI Kota Cimahi untuk JKN-KIS mengalami penambahan. Hal itu terkait dengan mewabahnya Covid-19, yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Penambahan penerima PBI untuk JKN-KIS ini dasarnya karena pandemi Covid, bisa dikatakan seperti itu. Karena masyarakat pada umumnya merupakan penjual jasa, yang bertani jarang. Kebanyakan pekerja hingga pedagang terkena imbas pandemi covid," beber Ajay.

### Pemerintah hadir

Meski demikian, Ajay menegaskan, Pemkot Cimahi berusaha hadir dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat. "Dengan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, bagaimana pemerintah berusaha ada dan hadir. Total anggaran untuk PBI JKN-KIS ini hampir Rp 5 miliar, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat," jelasnya.

Ajay menekankan imbauan kepada masyarakat agar protokol kesehatan tetap dijalankan untuk mencegah penularan covid-19.

"Banyak penerima JKN-KIS pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak seperti pedagang, dan lain-lain. Protokol kesehatan tetap harus diperhatikan dan dijalankan agar kita semua terhindar dari corona," tuturnya.

Menurut Ajay, di samping upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran dan pencegahan Covid-19, program kesehatan lain masih tetap harus dilaksanakan. Antara lain pemberian vitamin A bagi balita yang sudah dilakukan rutin pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. (B.110)\*\*